

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendidikan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Secara menyeluruh, proses belanja modal Dinas Pendidikan Provinsi NTT sudah menjalankan tugas realisasi belanjanya sesuai dengan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Pengelolaan belanja modal Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 belum dikatakan efektif karena dalam pengelolaannya masih terdapat tahapan-tahapan yang belum berjalan dengan baik.
3. Pada tahap perencanaan, sudah dikatakan baik karena Dinas Pendidikan dalam perencanaannya sudah memperhatikan kebutuhan masyarakat akan pendidikan melalui permohonan yang diajukan oleh para kepala sekolah. Namun pada tahap ini pula, Dinas Pendidikan sedikit lamban dalam merencanakan anggaran. Atas keterlambatan tersebut, maka ada belanja modal yang tidak bisa terlaksana dengan baik, sebut saja belanja modal pengadaan alat peraga/praktek sekolah seperti pada tabel 5.1. Anggaran untuk belanja modal tersebut adalah sebesar Rp21.700.092.000, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp1.849.908.000.

4. Pada tahap pelaksanaannya, pada satu sisi penulis mengambil kesimpulan bahwa secara umum Dinas Pendidikan Provinsi NTT sudah melakukan tugas pelaksanaannya dengan efektif. Hal ini dikarenakan realisasi belanjanya selalu lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dan merujuk dari konsep kinerja belanja dimana ‘belanja dikatakan baik apabila belanja lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan atau belanja menghabiskan anggaran sebesar anggaran itu sendiri’. Namun pada sisi lain, pelaksanaan anggaran belanja modal pada dinas Pendidikan Provinsi NTT juga bisa dikatakan gagal, karena ada beberapa item belanja yang realisasi anggarannya sangat minim. Sedangkan, dalam hal menghemat anggaran, dinas pendidikan provinsi NTT juga sudah melakukan tugasnya pelaksanaannya dengan baik, yakni dengan menyeleksi kebutuhan mana yang harus diprioritaskan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis pengelolaan belanja modal pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT tahun anggaran 2017, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi NTT, dalam proses perencanaan sebaiknya lebih jeli lagi dalam menentukan Harga Perkiraan Sementara belanja modal, agar tidak terjadi pembengkakkan anggaran yang tidak perlu, seperti pada sub item belanja modal pengadaan alat pendingin dan belanja modal pengadaan alat UPS/stabilizer. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi NTT juga harus lebih cepat dalam melakukan

perencanaan anggaran dan segera melakukan pelelangan untuk pekerjaan yang harus dilelang kepada kontraktor, agar realisasi belanja modal bisa dilaksanakan.

2. Dalam tahap pelaksanaan, diharapkan bagi Dinas Pendidikan Provinsi NTT harus lebih memaksimalkan anggaran yang sudah diberikan pemerintah, sehingga anggaran itu tidak mubazir hingga akhirnya harus dikembalikan kepada pemerintah. Selain itu, dinas pendidikan provinsi NTT dan Kementrian Pendidikan agar lebih proaktif dan lebih cepat untuk melakukan proses pelelangan terhadap item belanja yang harus dilelang kepada para kontraktor, sehingga realisasi belanja bisa terlaksana.
3. Bagi peneliti lain, diharapkan tulisan ini dapat dijadikan rujukan guna melakukan penelitian lebih lanjut dalam lingkup yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat
- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Fajar Nugroho. 2012. Analisis Pengelolaan Belanja Modal Pada Bagian Perlengkapan Setda Kota Manado. Manado. Politeknik Negeri Manado.<http://repository.polimdo.ac.id/id/eprint/994>. 23 Mei 2018.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Marlina, Fina. 2010. *Pengelolaan Belanja Modal Pada Kantor Gubernur Jambi Sesuai PP Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jambi. Universitas Andalas.<http://repo.unand.ac.id/id/eprint/1484>. 23 Mei 2018.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Pemendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Seran, Beatriks Giusephina. 2018. Analisis Pengelolaan Belanja Modal Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Kupang: Unwira
- Undang-Uundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf
- Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
<http://kppnmetro.org/2018/11/perpres-nomor-16-2018-tentang-pengadaan-barangjasa-pemerintah>